

## BAB IV P E N U T U P

Dari seluruh uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditampilkan secara ringkas sebagai berikut :

1. **Kebijakan Pemerintah Daerah** Tahun 2016, telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2015. RKPD ini merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan prioritas pembangunan daerah, sebagai penjabaran dari visi misi daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016.
2. Dalam RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2015, telah ditetapkan **Prioritas Pembangunan Daerah** Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :
  - a. Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal.
  - b. Peningkatan ketrampilan dan kewirausahaan.
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
  - d. Peningkatan pemerataan pembangunan.
  - e. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
  - f. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan kesetiakawanan sosial.
  - g. Peningkatan program pro rakyat (penanggulangan kemiskinan) dan program keadilan untuk semua.
  - h. Peningkatan kesadaran hukum.
  - i. Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik.
  - j. Perintisan dan pengembangan industri dan perdagangan yang terkait dengan pertanian dalam arti luas
3. APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2015, sedangkan perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2016.
4. Secara ringkas, **realisasi pelaksanaan APBD** Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016 meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, masih bersifat sementara, karena belum selesai diaudit oleh BPK RI, adalah sebagai berikut :
  - a. **Pendapatan Daerah**  
Target pendapatan daerah tahun anggaran 2016 sebesar Rp.2.374.362.555.000,- terealisasi sebesar 92,79%, dengan

komposisi sumber pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah 13,58%; Dana Perimbangan 69,24%; dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah 17,18%.

**b. Belanja Daerah**

Alokasi belanja daerah tahun anggaran 2016 sebesar Rp.2.615.270.722.441,- terealisasi sebesar 89,14%, dengan komposisi Belanja Tidak Langsung sebesar 56,80% dan Belanja Langsung 43,20%.

Untuk Belanja Tidak Langsung tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp. 1.488.003.187.441,- terealisasi sebesar 88,99%, sedangkan Belanja Langsung tahun 2016 sebesar Rp.1.127.267.535.000,- terealisasi sebesar 89,35%.

**c. Pembiayaan Daerah**

Pada tahun anggaran 2016 Pembiayaan Netto dalam angka positif, sehingga dapat menutup defisit anggaran dan masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.119.827.464.907,-.

5. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2015 antara lain sebagai berikut :

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah, seperti jalan, jembatan, pengairan, pusat-pusat perdagangan dan perindustrian rakyat, pusat-pusat pendidikan, dan pusat-pusat pembinaan kesehatan serta infrastruktur strategis lainnya. Antara lain sebagai berikut :
  - 1) Tidak berjalannya mekanisme perencanaan urusan pekerjaan umum serta munculnya *conflict of interest* dalam penyusunan perencanaan kegiatan;
  - 2) Keterbatasan kapasitas manajerial dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum, sehingga sulitnya pencapaian sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan terkait dengan urusan pekerjaan umum;
  - 3) Rendahnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum;
  - 4) Masyarakat petani belum memahami kepemilikan bantaran sungai sehingga banyak digunakan untuk lahan pertanian dan perumahan;
  - 5) Struktur tanah di Kabupaten Grobogan merupakan tanah lempung bersifat ekspansif dan berpotensi kembang susut yang sangat signifikan, sangat tidak cocok menjadi tanah dasar pembangunan dibidang pekerjaan umum, terutama

pembangunan jalan karena CBR nya dibawah 3%, jauh dari persyaratan pembangunan jalan yang minimal 5%, sehingga untuk membuat konstruksi yang sesuai dengan kondisi tanah tersebut diperlukan biaya yang sangat besar;

- 6) Sebagian besar bahan bangunan untuk konstruksi jalan didatangkan dari luar Kabupaten Grobogan, sehingga biaya bahan bangunan menjadi lebih besar;
  - 7) Terdapat 2 kegiatan konstruksi yang memiliki realisasi fisik sebesar 52 % , hal ini di sebabkan karena mutu pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak, penyedia tidak mau memperbaiki sehingga di lakukan pemutusan kontrak;
  - 8) Masih rendahnya kesadaran masyarakat/pengguna jalan dalam mentaati peraturan lalu lintas sehingga sering mengakibatkan terjadinya kemacetan dan kecelakaan;
  - 9) Banyaknya kendaraan angkutan umum yang tidak laik jalan tetapi masih dioperasikan;
  - 10) Masih rendahnya pengetahuan awak/kru kendaraan angkutan umum tentang tata tertib berlalu lintas;
  - 11) Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan serta fasilitas lalu lintas seperti rambu-rambu, marka jalan, RPPJ, APILL, dan lainnya;
- b. Permasalahan yang dihadapi dalam memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik. Antara lain sebagai berikut :
- 1) Masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan sarana prasarana pendidikan khususnya perpustakaan, laboratorium, media pembelajaran dll sehingga mutu lulusannya masih rendah;
  - 2) Masih ada sekolah yang kondisi gedungnya memprihatinkan;
  - 3) Masih banyak siswa yang tidak melanjutkan sekolah atau terpaksa drop out karena ketidakmampuan membayar biaya pendidikan sekolah;
  - 4) Pencapaian Akseptor KB Pria ( MOP dan Kondom ) masih rendah;
  - 5) Pendapatan Ekonomi Keluarga Pra Sejahtera masih rendah;
  - 6) Pemahaman terhadap Isu Gender pada semua lapisan masyarakat masih rendah;
  - 7) Data Pilah Gender dalam program / kegiatan pada SKPD belum maksimal;

- 8) Masih kurangnya kebutuhan tenaga PNS untuk mendukung kinerja Dinas , mengingat jumlah PNS yang ada sekarang ini belum mencukupi sehingga perlu penambahan PNS;
  - 9) Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan presentatif yang mana Gedung Olah Raga belum maksimal dalam pengelolaannya;
  - 10) Masih Kurangnya pembinaan yang berjenjang pada atlet yang berprestasi;
  - 11) Masih kurangnya pembinaan pada pemuda agar mereka dapat berdikari sendiri dan rasa nasionalisme yang kurang.
- c. Permasalahan yang dihadapi dalam memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Antara lain sebagai berikut :
1. Masih tingginya angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKABA);
  2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat;
  3. Cakupan penimbangan balita (D/S) masih kurang dari target 80%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu sebagai salah satu UKBM masih kurang;
  4. Masih ditemukan peredaran makanan dan minuman di masyarakat yang belum berizin SPIRT yang dikeluarkan Pemda cq. Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan;
  5. Penentuan kriteria masyarakat miskin untuk jamkesda tambahan belum mengacu pada ketentuan BP3AKB tentang kriteria miskin;
  6. Kurangnya peran Kepala Desa dalam membina FKD (Forum Kesehatan Desa) dalam upaya pembangunan Desa Siaga terutama penganggaran dari desa;
  7. Penanggulangan gizi buruk yang belum maksimal;
  8. Penggunaan garam beryodium ditingkat masyarakat belum maksimal;
  9. Pencapaian ASI Eksklusif masih kurang dari target 80%;
  10. Kasus penyakit menular pada remaja di Kabupaten Grobogan masih tinggi;
  11. Populasi jumlah Usila di Kabupaten Grobogan semakin bertambah/meningkat, namun program Usila belum program prioritas;
  12. Ketidak disiplin masyarakat dalam menggunakan kartu kepesertaan untuk berobat sehingga terjadi pengalokasian biaya kesehatan yang tidak seimbang akhirnya membebani Anggaran Daerah;
  13. Kurangnya Tenaga Medis dan Paramedis.

- d. Permasalahan yang dihadapi dalam memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata. Antara lain sebagai berikut :
- 1) Masih kurangnya peraturan peraturan yang mendukung penataan ruang wilayah;
  - 2) Perlunya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penataan ruang dan bangunan;
  - 3) Luasnya cakupan wilayah mengakibatkan tidak tersedianya database perencanaan pembangunan yang memadai;
  - 4) Masih kurangnya sinkronisasi antar SKPD bidang perekonomian dalam pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan;
  - 5) Terdapat 5 (lima) kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan diantaranya adalah :
    - Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ijin Pemanfaatan Ruang.
    - Kegiatan Penyusunan Peta Analog dan Peta Digital Rencana Tata Ruang (Luncuran 2014).
    - Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
    - Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ijin Pemanfaatan Ruang, dengan realisasi fisik sebesar 0 % ;
    - Kegiatan Penyusunan pra survey Tahun 2015/ 2016, selama 12 bulan.
  - 6) Tidak berjalannya mekanisme perencanaan urusan perumahan serta munculnya *conflict of interest* dalam penyusunan perencanaan kegiatan;
  - 7) Keterbatasan modal usaha petani / peternak;
  - 8) Ketersediaan pakan ternak baik kualitas maupun kuantitas terutama di musim kemarau masih menjadi kendala dalam meningkatkan produksi maupun produktifitas ternak;
  - 9) Masih rendahnya tingkat pemahaman petani peternak dan pembudidaya ikan dalam pengelolaan usaha ternak dan ikannya;
  - 10) Keterbatasan SDM tenaga tehnis peternakan yang profesional;



- 11) Belum punya tenaga profesi dan peralatan penera UTTP di Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang UTTP;
- 12) Adanya rembesan peredaran barang dari daerah lain yang masuk wilayah Kabupaten Grobogan yang tidak sesuai dengan peraturan tata niaganya;
- 13) Fluktuasi harga yang terjadi di masyarakat terutama pada saat menghadapi Ramadhan, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru;
- 14) Pedagang belum memahami hak dan kewajiban berkaitan dengan izin pemakaian tempat dan pada UPTD Pasar Daerah belum ada petugas yang khusus mengurus pasar;
- 15) Belum ada kesepakatan dengan pedagang unggas berkaitan dengan relokasi pasar;
- 16) Lesunya pemasaran produk makanan olahan;
- 17) Pengrajin masih kesulitan dalam pembuatan desain batik;
- 18) Terbatasnya ketrampilan pengrajin kulit;
- 19) Terbatasnya ketrampilan pengrajin olahan produk industri jagung;
- 20) Ketrampilan pengrajin tenun masih rendah;
- 21) Terbatasnya pengetahuan dan kemampuan industri olahan abon dari bahan baku ikan lele;
- 22) Terbatasnya mesin peralatan produksi industri olahan abon lele;
- 23) Terbatasnya pengetahuan dan kemampuan pengrajin susu, yoghurt berbahan baku kedelai;
- 24) Terbatasnya mesin peralatan produksi industri susu, yoghurt;
- 25) Terbatasnya pengetahuan dan kemampuan industri olahan aneka buah dan sayuran;
- 26) Terbatasnya mesin Vacuum Drying aneka buah dan sayuran;
- 27) Terbatasnya contoh desain batik bagi sentra-sentra KUB batik;
- 28) Terbatasnya modal, sarana dan prasarana untuk mendukung proses produksi di dalam pengelolaan perikanan;
- 29) Masih kurangnya tingkat pengetahuan petani nelayan dalam hal teknologi budidaya ikan;
- 30) Sebagian besar usaha perikanan di Kabupaten Grobogan merupakan kolam tadah hujan sehingga sangat dipengaruhi oleh musim;



- 31) Masih rendahnya penerapan teknologi perikanan terutama dalam penanganan pasca panen produk perikanan (Tekhnologi pengolahan produk perikanan);
  - 32) Kesulitan dalam pemasaran produksi hasil perikanan;
  - 33) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata di semua obyek wisata di Kabupaten Grobogan dikarenakan penanganan dan pengelolaan yang masih kurang optimal dan infrastruktur jalan yang kurang mendukung;
  - 34) Masih kurangnya kesadaran masyarakat sekitar obyek wisata yang masuk dalam kelompok sadar wisata dalam ikut mengelola dan memelihara kebersihan dalam obyek wisata;
  - 35) Masih kurangnya kesempatan untuk melaksanakan promosi pariwisata didalam dan diluar daerah Kabupaten Grobogan, dikarenakan sulitnya mengkoordinasi para seniman daerah, masih minimnya macam kesenian daerah yang dapat menunjang pariwisata dan mahalnnya stand pameran;
  - 36) Investor luar kurang tertarik untuk menanamkan modalnya di bidang pariwisata di kabupaten Grobogan;
  - 37) Masih Kurangnya minat masyarakat Grobogan akan kesenian daerah;
  - 38) Masih kurangnya mengenalkan seni budaya asli Grobogan;
  - 39) Upacara tradisional di Kabupaten Grobogan mulai banyak di tinggalkan;
  - 40) Kurang berkembangnya organisasi seni tradisional di kabupaten Grobogan karena kelengkapan organisasi kurang memadai dan alat kesenian juga kurang.
- e. Permasalahan yang dihadapi dalam memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Antara lain sebagai berikut :
- 1) Masih kurangnya pemahaman pengurus barang terhadap pedoman pengelolaan barang daerah;
  - 2) Masih kurangnya tenaga pemeriksa/pejabat fungsional yang meliputi Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintahan sebanyak 20 (duapuluh) orang dengan latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi, Hukum, Teknik dan Apoteker. Hal ini disebabkan obyek pemeriksaan ke depan semakin kompleks dan beban tugas diluar pemeriksaan semakin banyak;
  - 3) Masih terbatasnya anggaran yang diberikan, khususnya guna meningkatkan kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah

- (APIP), perlu adanya tambahan penghasilan guna kesejahteraan pegawai;
- 4) Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2015 yaitu : Kegiatan Pelatihan Damage and Loss Assessment (DALA);
  - 5) Masih kurangnya peralatan sarana dan prasarana kearsipan dan depo arsip;
  - 6) Kesulitan kurangnya tenaga / pegawai PNS yang membina dan mengolah arsip terutama jabatan fungsional yaitu arsiparis;
  - 7) Kurang optimalnya penanganan pelanggaran Perda, di sebabkan belum optimalnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang membidangi penyidikan pelanggaran Perda, serta koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait kurang maksimal;
  - 8) Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk mentaati peraturan daerah di dalam menciptakan suasana yang tertib dan aman;
  - 9) Banyaknya bermunculan usaha tempat hiburan cafe karaoke yang tidak berijin;
  - 10) Masih kurangnya kesadaran masyarakat bahwa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil itu sangat penting dan apabila membutuhkan baru mencari.
- f. Permasalahan yang dihadapi dalam memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian. Antara lain sebagai berikut :
- 1) Keterbatasan kapasitas manajerial dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum, sehingga sulitnya pencapaian sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan terkait dengan urusan pekerjaan umum;
  - 2) Rendahnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum;
  - 3) Pertambangan tanpa ijin dilakukan oleh masyarakat di beberapa kecamatan;
  - 4) Pemeliharaan bantuan PLTS belum dapat dilakukan karena tidak ada teknisi di SKPD.
  - 5) Desa/Kelurahan yang ada pangkalan LPG 3 Kg baru berjumlah 63,5 % dari seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Grobogan;
  - 6) Perubahan jumlah lokasi kegiatan dan referensi bahan dari konsultan;



- 7) Semakin maraknya pemanfaatan air tanah untuk usaha oleh masyarakat;
  - 8) Rendahnya penganggaran para petugas kebersihan jauh di bawah UMR sehingga tidak maksimal dalam memberikan beban kerja;
  - 9) Frekuensi pekerjaan yang tidak stabil menyulitkan dalam perhitungan kebutuhan;
  - 10) Pelaku usaha masih belum tertib dalam pelaporan pengelolaan lingkungan;
  - 11) Banyaknya kader lingkungan tingkat kecamatan yang tidak dilibatkan dalam kegiatan LH sehingga sosialisasi pengelolaan LH di tingkat daerah kurang;
  - 12) Masih kurangnya koordinasi dengan stake holder/dinas instansi terkait;
  - 13) Kesadaran masyarakat akan keteduhan dan kebersihan di Kota Purwodadi masih rendah, kurangnya himbauan/slogan tentang kebersihan dan keteduhan;
  - 14) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pemilahan sampah.
6. Solusi-solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. Solusi yang harus dilakukan dalam rangka memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah, seperti jalan, jembatan, pengairan, pusat-pusat perdagangan dan perindustrian rakyat, pusat-pusat pendidikan, dan pusat-pusat pembinaan kesehatan serta infrastruktur strategis lainnya adalah sebagai berikut :
    - 1) Diusulkan penambahan jumlah SDM / staf teknis untuk pengelolaan urusan pekerjaan umum;
    - 2) Fasilitasi Kegiatan Peningkatan intensitas koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan urusan pekerjaan umum;
    - 3) Diusulkan penambahan ketersediaan anggaran guna pelaksanaan kegiatan urusan pekerjaan umum;
    - 4) Pembinaan kelompok tani dan memanfaatkan setiap forum yang ada untuk menyadarkan petani dan masyarakat sekitar tentang fungsi dan manfaat dari bantaran sungai;
    - 5) Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan P3A ( Perkumpulan Petani pemakai Air ) tentang tata pola tanam yang tepat dalam skala yang luas;

- 6) Solusi yang telah dilakukan untuk menangani kondisi tanah yang tidak mendukung telah diterapkan konstruksi beton;
  - 7) Sedangkan untuk menangani banyaknya panjang jalan yang rusak telah dilaksanakan prioritas penanganan Kegiatan Peningkatan atau pemeliharaan jalan dengan prioritas utama pada jalur trayek, jalan kabupaten dan jalan desa. Dengan konstruksi ini diharapkan umur konstruksi jalan minimal 10 tahun dengan konsekuensi biaya yang mahal dibandingkan dengan konstruksi ATB;
  - 8) Pada pekerjaan tidak selesai dan mengalami putus kontrak maka pekerjaan di bayar sesuai dengan capaian fisik dilapangan dan penyedia di masukan ke dalam daftar hitam, serta pekerjaan yang baru satu sisi segera di usulkan kembali penanganannya di tahun anggaran berikutnya;
  - 9) Memperbaiki dan mencermati kembali dalam proses usulan maupun perencanaan, sehingga tidak terjadi kegiatan yang batal di laksanakan ataupun peminndahan lokasi pekerjaan;
  - 10) Mempercepat proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa / lelang untuk kegiatan agar pelaksanaan pekerjaan dapat di mulai lebih awal;
  - 11) Melaksanakan optimalisasi dan efisiensi anggaran yang telah ditetapkan Pemda dan berusaha mengajukan tambahan anggaran sehingga secara bertahap dapat mewujudkan tercapainya SPM;
  - 12) Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat/pengguna jalan khususnya pemilik kendaraan tentang pentingnya mentaati peraturan / tata tertib berlalu lintas;
  - 13) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan meningkatkan operasi bersama guna penertiban lalu lintas bagi kendaraan angkutan umum;
  - 14) Memberikan pembinaan terhadap awak / kru kendaraan angkutan umum tentang tata tertib berlalu lintas;
  - 15) Menambah fasilitas, sarana dan prasarana perhubungan serta memelihara secara maksimal terhadap perlengkapan lalu lintas dan prasarana perhubungan yang sudah ada.
- b. Solusi yang harus dilakukan dalam rangka memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik, adalah sebagai berikut :
- 1) Peningkatan sarana prasarana dan gedung sekolah yang memenuhi standar kelayakan dengan menambah alokasi anggaran untuk peningkatan sarana prasarana sekolah;
  - 2) Peningkatan rehabilitasi gedung sekolah;

- 3) Alokasi anggaran untuk bantuan siswa yang tidak mampu ditambah sehingga mereka dapat meneruskan sekolah yang lebih tinggi;
  - 4) Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga pembuatan lintasan sepatu roda dan pemindahan, pengurukan serta pembuatan panjat tebing;
  - 5) Perlunya adanya pembinaan yang berjenjang dari tingkat SD sampai SMA dengan sering mengadakan perlombaan dan pertandingan sehingga akan menciptakan atlet-atlet yang handal;
  - 6) Perlunya mengadakan diklat pada pemuda yang mengacu pada keterampilan untuk hidup ( life skill ) agar pemuda bisa berdikari sendiri;
  - 7) Meningkatkan anggaran untuk biaya operasional peningkatan pembinaan, pendampingan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ).
- c. Solusi yang harus dilakukan dalam rangka memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang, adalah sebagai berikut :
- 1) Penerapan kebijakan persalinan di Puskesmas mulai 01 Januari 2015, sehingga diharapkan dengan kelengkapan peralatan dan kesiapan tenaga kesehatan yang memadai dapat menekan angka kematian tersebut;
  - 2) Pelaksanaan Program EMAS dengan memperkuat sistem rujukan dalam mengatasi kegawatdaruratan kebidanan;
  - 3) Peningkatan peran serta lintas sektor melalui koordinasi secara berjenjang terus diupayakan, mengingat indikator program kesehatan tidak mungkin dapat diselesaikan jajaran kesehatan tanpa dukungan semua pihak;
  - 4) Pembinaan IRT dan sosialisasi termasuk penertiban izinnya;
  - 5) Ketentuan kriteria tentang masyarakat miskin secara obyektif harus dilakukan sebelum mendapat pengesahan dari camat;
  - 6) Dukungan semua stakeholder termasuk camat membantu sosialisasi pada setiap Kesempatan baik kepada kader/perangkat dan pihak-pihak lain yang memungkinkan informasi sampai kepada masyarakat/sasaran;
  - 7) Ada Anggaran ADD/APBDes untuk Desa Siaga / Operasional FKD dan mendukung operasionalisasi UKBM (Posyandu), sehingga akses dan pemanfaatannya oleh masyarakat dapat meningkat;
  - 8) Pemantapan lintas program dan lintas sektor untuk penanggulangan gizi buruk;

- 9) Sosialisasi kepada masyarakat pentingnya garam beryodium bagi kesehatan;
  - 10) Pelaksanaan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian ASI eksklusif dengan memberikan pembinaan kepada Bidan yang melanggar peraturan tersebut;
  - 11) Meningkatkan koordinasi teknis Tim PP-ASI dan mensosialisasikan PP-ASI di Tingkat Kecamatan sampai ke Desa;
  - 12) Melaksanakan kelas hamil tingkat desa;
  - 13) Melaksanakan Sosialisasi dan KIE di sekolah dan luar sekolah;
  - 14) Pembinaan kesehatan pada kelompok Pra Usila dan Usila;
  - 15) Mensosialisasikan pada masyarakat tentang penggunaan kartu kepesertaan dalam berobat ke Puskesmas;
  - 16) Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam mengawal Instruksi Bupati Grobogan Nomor 442/5362/VII Tahun 2012 tentang Tindak Lanjut Kinerja Hasil Kalakarya Daerah Bermasalah Kesehatan Kabupaten Grobogan, sehingga peran masing-masing sektor dan khusus bagi tenaga kesehatan secara konkrit dapat dilaksanakan dalam upaya mengatasi masalah-masalah kesehatan di Kabupaten Grobogan;
  - 17) Pelaksanaan Kalakarya bidang kesehatan secara rutin tiap tahun dalam rangka melaksanakan evaluasi program-program kesehatan dengan menyinergikan kebijakan kesehatan dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten untuk memperoleh dukungan secara aktif oleh pihak-pihak terkait;
  - 18) Koordinasi lintas sektor tentang perlunya anggaran, untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit;
  - 19) Mengusulkan pada Pemerintah dan kerjasama dengan Universitas untuk penambahan Tenaga Medis dan Paramedis.
- d. Solusi yang harus dilakukan dalam rangka memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata, adalah sebagai berikut :
- 1) Diusulkan terbitnya perda baru tentang penataan ruang;
  - 2) Perlunya sosialisasi yang lebih intensif tentang penataan ruang dan bangunan;
  - 3) Penyusunan database perencanaan pembangunan terkait bidang Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan secara menyeluruh dan berkesinambungan;



- 4) Penyusunan SPM bidang cipta karya tata ruang dan kebersihan;
- 5) Peningkatan sinkronisasi antar SKPD bidang perekonomian dalam pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan;
- 6) Adanya pelatihan, bintek, kursus ataupun seminar dalam rangka peningkatan SDM pada pegawai/karyawan;
- 7) 5 (lima) kegiatan yang tertunda akan dilaksanakan pada tahun 2016 ini;
- 8) Optimalisasi sumber daya yang tersedia diikuti penambahan sumber daya organisasi pengelola urusan perumahan;
- 9) Penyusunan database secara menyeluruh dan berkesinambungan terkait urusan perumahan;
- 10) Fasilitasi peningkatan intensitas koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan urusan perumahan;
- 11) Diusulkan penambahan ketersediaan anggaran guna pelaksanaan kegiatan urusan perumahan;
- 12) Fasilitasi secara berkesinambungan koordinasi dengan masyarakat terkait urusan perumahan;
- 13) Meningkatkan minat masyarakat Grobogan dengan sering menyelenggarakan pagelaran seni lokal agar masyarakat tahu dan mecntai radisi lokal;
- 14) Mengenalkan seni budaya asli Grobogan dengan menyelenggarakan parade seni supaya masyarakat mengenal seni budaya lokal;
- 15) Menggali lagi upacara tradisional yang ada di Kabupaten Grobogan dengan cara mendokumentasikan upacara tradisional yang ada di Kabupaten Grobogan;
- 16) Menyelenggarakan setiap tahun pembuatan Film dan pembuatan sekrenario film agar masyarakat semakin meinati dan tahu tetang pembuatan film dan Sekrenario dengan baik dan benar;
- 17) Memberikan sosialisasi kepada Organisasi seni akan pentingnya kelengkapan Organisasi seperti Susunan Organisasi, Sekretariat, Akte Berdirinya yang sudah terdaftar pada Kementrian Hukum dan Ham juga bantuan alat kesenian untuk organisasi tradisional supaya tidak hilang;
- 18) Peningkatan bantuan ternak / ikan dengan perbankan antara lain melalui Program KKPE( Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) dan Program KUPS (Kredit Usaha Peternakan Sapi);
- 19) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani peternak dan pembudidaya ikan melalui pembinaan, pelatihan dan study lapang;



- 20) Diusulkan penambahan tenaga tehnis peternakan dan kedokteran hewan;
- 21) Diklat tenaga profesi penera UTTP dan memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan tera, tenaga penara dan peralatan dari Balai Metrologi Semarang;
- 22) Meningkatkan monitoring dan pengawasan distribusi dan memberikan pembinaan kepada distributor dan pengecer serta kelompok tani;
- 23) Meningkatkan pengawasan peredaran barang dan / atau jasa ditoko, pasar dan toko modern;
- 24) Meningkatkan monitoring dan laporan sehingga dapat diketahui perkembangannya untuk dapat dipakai dasar mengambil kebijakan bagi pimpinan;
- 25) Melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif ke pedagang dan mengoptimalkan personil yang ada di UPTD Pasar Daerah;
- 26) Pembangunan/revitalisasi pasar tradisional dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan;
- 27) Melakukan sosialisasi/diskusi berkaitan dengan lokasi yang ditempati bukan merupakan aset Pemkab, melainkan milik pihak ke-3 (PT. KAI) dengan ikatan perjanjian sewa;
- 28) Perlu tambahan alokasi anggaran pada tahun-tahun mendatang agar dapat mengikuti event-event pameran di tingkat Nasional / antar Provinsi;
- 29) Perlunya pelatihan motif desain batik secara kontinue;
- 30) Melaksnakan pelatihan ketrampilan produk kulit secara kontinue;
- 31) Memberikan tambahan bantuan mesin peralatan produksi kulit dengan catatan kelompok mau dan memiliki Badan Hukum;
- 32) Melaksanakan pelatihan ketrampilan produksi olahan dari bahan baku jagung secara kontinue;
- 33) Memberikan tambahan bantuan mesin peralatan produksi jagung;
- 34) Meningkatkan variasi produk bambu;
- 35) Meningkatkan ketrampilan pengrajin tenun;
- 36) Memberikan tambahan bantuan mesin peralatan tenun dengan catatan kelompok mau dan memiliki Badan Hukum;
- 37) Memperluas jaringan pemasaran;
- 38) Melaksanakan pelatihan ketrampilan industri olahan abon dengan bersinergi dengan industri abon Kabupaen Boyolali;
- 39) Memberikan tambahan bantuan mesin peralatan produksi olahan abon;



- 40) Melaksanakan pelatihan ketrampilan pengrajin susu, yoghurt berbasis kedelai secara kontinue;
  - 41) Memberikan tambahan bantuan mesin peralatan produksi susu, yoghurt dengan catatan kelompok mau dan memiliki Badan Hukum;
  - 42) Melaksanakan pelatihan ketrampilan industri olahan aneka buah dan sayuran secara kontinue;
  - 43) Memberikan tambahan bantuan mesin Vacum Drying aneka buah dan sayuran;
  - 44) Peningkatan ketrampilan desain motif batik;
  - 45) Magang kerja ke industri batik yang lebih maju;
  - 46) Pembinaan yang lebih intensif terhadap kelompok tani nelayan maupun UPR – UPR yang ada;
  - 47) Bantuan paket modal dan alih teknologi perikanan;
  - 48) Memasyarakatkan gemar makan ikan ( Gemarikan ) dan pelatihan pengolahan produk berbahan baku ikan;
  - 49) perlunya dibangun pasar benih dan pasar ikan untuk menampung hasil usaha perikanan dari peternak ikan dan meningkatkan alur distribusi ikan dan benih ikan;
  - 50) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata seperti mainan anak-anak disetiap lokasi obyek wisata dan penghijauan diliokasi obyek wisata, peningkatan infrastuktur jalan yang memadai sebagai akses menuju ke lokasi obyek wisata;
  - 51) Mengadakan sosialisasi pada kelompok sadar wisata tentang pentingnya kebersihan dan ketertiban dilingkungan obyek wisata;
  - 52) Mengadakan pendataan yang akurat obyek wisata yang potensial di Kabupaten Grobogan, mencari investor untuk ikut mengelola obyek wisata dan mengadakan koordinasi pada seniman dan menggali potensi budaya yang dapat menjadi wisata budaya di Kabupaten Grobogan, aktif mengikuti pameran diluar daerah Kabupaten Grobogan guna mempromosikan wisata di Kabupaten Grobogan;
  - 53) Memberikan kemudahan izin pada investor dalam penanaman modalnya untuk Pariwisata di Kabupaten Grobogan.
- e. Solusi yang harus dilakukan dalam rangka memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan SDM melalui Pembekalan Peningkatan Pengelolaan Barang Daerah;
- 2) Rekonsiliasi pada akhir tahun anggaran antara DPPKAD dengan SKPD;
- 3) Mengusulkan kepada Pemerintah dalam hal pengisian CPNS mendatang agar dapat dipenuhi kebutuhan pegawai khususnya untuk tenaga operasional pemeriksa / pejabat fungsional, dengan latar belakang pendidikan Ekonomi, Hukum, Teknik dan Apoteker guna mendukung kinerja pengawasan;
- 4) Mengusulkan kepada Pemerintah agar dalam perencanaan anggaran di tahun mendatang Inspektorat diberikan tambahan plafon anggaran guna peningkatan kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yaitu untuk tambahan penghasilan berupa Tunjangan Kesejahteraan Kelangkaan Profesi;
- 5) Kegiatan Pelatihan Damage and Loss Assessment (DALA) tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2016 karena sudah dianggarkan. Oleh karena itu atas hal sebagaimana tersebut pada tahun 2015 yang lalu, pada tahun 2016 ini tidak akan terjadi lagi;
- 6) Peningkatan peralatan kearsipan dan depo arsip;
- 7) Diusulkan penambahan tenaga / pegawai PNS yang berkompeten dan tenaga fungsional yaitu arsiparis;
- 8) Mengadakan sosialisasi administrasi kependudukan sampai tingkat desa/kelurahan;
- 9) Mengusulkan UPTD mengingat penduduk dan wilayah Kab. Grobogan luas dan penduduknya diatas 1 juta jiwa;
- 10) Perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan kapasitas personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta meningkatkan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait kurang maksimal;
- 11) Perlunya pembinaan dan masukan pendapat di antara komponen masyarakat, agar dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing;
- 12) Perlu dilakukan sosialisasi dan koordinasi yang intensif melalui pertemuan dengan para Pedagang Kaki Lima dan paguyuban Pedagang Kaki Lima dalam rangka penataan serta penertiban kepada para Pedagang Kaki Lima yang melanggar Perda;
- 13) Perlunya diadakan kajian ulang tentang perijinan pelaksanaan penambangan galian C yang selama ini masih berlangsung;

- 14) Penegakan perda melalui pelaksanaan Yustisi yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta instansi terkait;
  - 15) Perlunya penambahan personil / pegawai dan meningkatkan ketrampilan pada pegawai yang ada semaksimal mungkin;
  - 16) Mengatur waktu sebaik mungkin, dalam hal pembagian jadwal pelayanan pemberkasan dan melaksanakan monitoring.
- f. Solusi yang harus dilakukan dalam rangka memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian, adalah sebagai berikut :
- 1) Dibuat buku prakiraan kebutuhan alat tulis kantor untuk bulan yang akan datang;
  - 2) Pemeliharaan dilaksanakan tidak pada saat rusak, namun secara berkala tiap bulan dengan batasan anggaran yang minimal;
  - 3) Pengambilan sampel harus memperhatikan keberadaan air yang akan diambil;
  - 4) Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan LH dengan cara sosialisasi, pembinaan, menegur pelaku usaha agar lebih tertib dalam pelaporan;
  - 5) Mengundang kader-kader LH ketika ada acara/event LH;
  - 6) Sosialisasi ke masyarakat ditingkatkan, penambahan dana untuk mengadakan himbauan/slogan;
  - 7) Telah dilakukan sosialisasi pengelolaan sampah, penyuluhan kepada masyarakat melalui pemasangan papan informasi;
  - 8) Fasilitasi peningkatan intensitas koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan urusan pekerjaan umum;
  - 9) Fasilitasi secara berkesinambungan koordinasi dengan masyarakat terkait urusan pekerjaan umum;
  - 10) Memberi teguran, saran dan bimbingan untuk mengurus perijinan pertambangan;
  - 11) Koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Jateng untuk mendapatkan fasilitasi pemeliharaan;
  - 12) Menghimbau kepada agen LPG untuk memecah atau membuka pangkalan baru di Desa/kelurahan yang belum ada pangkalan LPG 3 Kg;
  - 13) Konsultasi dan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Jateng dan Badan Geologi Bandung;
  - 14) Memberikan saran dan bimbingan untuk segera mengurus

perijinan air tanah.

Secara umum, capaian kinerja Sasaran Strategis tahun kelima RPJMD Kabupaten Grobogan 2011 – 2016 tercapai dengan **kualifikasi Sangat Baik (skor = 128,45%)** naik 4,557% dibanding capaian kinerja pada Tahun 2015 (skor 2015 = **123,686%**). Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Grobogan tahun kelima juga dapat dilihat dari pencapaian target beberapa indikator makro sosial ekonomi Kabupaten Grobogan.

**Prestasi/penghargaan** yang diperoleh Kabupaten Grobogan selama tahun 2015, adalah sebagai berikut :

- a. Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015.
- b. Penghargaan Nasional sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia.
- c. Penghargaan Nasional tingkat madya “Anugerah Parahita Ekapraya” bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. Peringkat II Nasional Lomba Web Kategori Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Pertanian.
- e. Peringkat II Nasional sebagai Paramedik Puskesmas Berprestasi a.n. Tidar Arga Sasmita, S.Pt.
- f. Peringkat II Nasional Lomba Kelompok Tani Komoditas Padi a.n. Kelompok Tani “Makmur” Desa Sumberagung Kecamatan Godong.
- g. Peringkat II Nasional Lomba Kelompok Tani Komoditas Kedelai a.n. Kelompok Tani “Sidodadi” Desa Tuko Kecamatan Pulokulon.
- h. Peringkat III Nasional lomba Petugas Inseminator Berprestasi a.n. Edy Sugijanto;

Dari uraian diatas, secara makro Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 telah menyelenggarakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya, meliputi urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan sehingga dapat berjalan secara baik dan optimal.



Disadari bahwa pelaksanaan pembangunan saat ini belum sepenuhnya dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyelesaikan semua persoalan secara menyeluruh. Hal ini bukan karena tidak mau atau kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, tetapi semata-mata karena keterbatasan sumber daya yang ada dan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Oleh karena itu, kepada semua pihak diharap dapat memberikan kritik, saran dan masukan yang konstruktif guna perbaikan atau peningkatan kinerja Pemerintah Daerah pada tahun-tahun mendatang.

Semoga laporan kinerja ini, dapat bermanfaat dan mampu menjadi pemacu peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja serta kepuasan masyarakat di Kabupaten Grobogan untuk tahun berikutnya.

Purwodadi, 27 Maret 2017

**BUPATI GROBOGAN,**

**SRI SUMARNI, SH, MM**